

## Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik

Muhammad Ananda Adhianugrah <sup>1</sup>; Zainul Djumadin <sup>2,\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia; [zainulunas@yahoo.co.id](mailto:zainulunas@yahoo.co.id)

\*Correspondence : [zainulunas@yahoo.co.id](mailto:zainulunas@yahoo.co.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh oligarki dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Kota Medan pada tahun 2020, menyoroti peran partai politik sebagai instrumen kekuasaan oligarki dalam demokrasi Indonesia. Metode penelitian kualitatif digunakan, dengan teknik pengumpulan data utama melalui wawancara dengan informan terkait. Penelitian ini menemukan bahwa oligarki memiliki peran signifikan dalam Pilkada Kota Medan, terutama dalam penentuan calon Walikota dan Wakil Walikota. Hal ini terjadi melalui dominasi elit partai politik dan ketergantungan calon terhadap partai politik yang mereka wakili. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik keterlibatan oligarki yang signifikan, di mana elit partai politik memainkan peran penting dalam proses seleksi dan pengusungan pasangan calon, menggambarkan interaksi kompleks antara kekuatan politik partai dan dinamika oligarki lokal.

### ABSTRACT

This study examines the influence of oligarchs in the regional elections (pilkada) in Medan City in 2020, highlighting the role of political parties as instruments of oligarchic power in Indonesian democracy. Qualitative research methods are used, with the main data collection techniques through interviews with related informants. This study found that oligarchs have a significant role in the Medan City Elections, especially in determining candidates for Mayor and Vice Mayor. This happens through the elite dominance of political parties and the dependence of candidates on the political party they represent. The results point to a practice of significant oligarchic involvement, in which political party elites play an important role in the process of selecting and vetting candidate pairs, illustrating the complex interaction between party political power and the dynamics of local oligarchs.

### Kata kunci

*Politik, Oligarki, Partai, Pilkada, Medan*

### Keywords

*Oligarchic, Politics, Political, Parties, Medan*

## Pendahuluan

Oligarki adalah sistem penguasaan sumber daya oleh individu atau kelompok kecil, yang pada dasarnya menguasai mayoritas masyarakat (Kodiyat & Andryan, 2021). Dalam konteks ini, kelompok elit mengendalikan banyak aspek, dan negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan mereka, yang seringkali tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan rakyat, keadilan, atau kebebasan individu (Permatasari, 2022). Teori Siklus Polybius menggambarkan oligarki sebagai kelanjutan dari sistem aristokrasi, di mana sekelompok bangsawan melawan penguasa tunggal, seperti raja atau dinasti monarki. Namun, seiring berjalannya waktu, kelompok bangsawan ini (oligarki) cenderung menjadi tamak dan menindas rakyat. Hal ini kemudian memicu perlawanan rakyat yang berujung pada pembentukan sistem demokrasi. Meskipun Siklus Polybius menyajikan oligarki sebagai kontraproduktif terhadap sistem demokrasi, dalam kenyataannya, oligarki tetap memengaruhi lingkungan demokrasi di berbagai negara. Bahkan, oligarki dapat memainkan peran kunci dalam menentukan pemimpin suatu pemerintahan (Syaputra<sup>1</sup> & Sihombing, 2020). Oleh karena itu, prinsip dasar demokrasi pun bisa menjadi rentan terhadap pengaruh oligarki.

Sistem demokrasi berlandaskan pada prinsip kedaulatan tertinggi negara yang ada di tangan rakyat, sebuah prinsip yang selaras dengan pedoman dasar Republik Indonesia, yaitu UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, yang menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, rakyat memiliki otoritas mutlak dalam segala aspek pemerintahan, termasuk dalam pemilihan pemimpin mereka. Pemilihan umum (pemilu) secara langsung menjadi alat utama dalam sistem demokrasi untuk memilih pemimpin. Rakyat memilih pemimpin mereka, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, peran partai politik (parpol) dalam menentukan calon pemimpin yang akan dipilih oleh rakyat menjadi sangat penting. Meskipun konsep pemilihan pemimpin oleh rakyat terlihat sederhana, secara praktis, proses pemilihan pemimpin melibatkan sejumlah langkah yang kompleks (Suryadi, 2022). Hal ini menyebabkan biaya yang tinggi, terutama bagi peserta pemilu. Proses inilah yang mendorong munculnya pemilik sumber daya dengan kekuasaan politik dan ekonomi (dikenal sebagai oligarki) yang berperan dalam menentukan siapa calon peserta pemilu (Hasibuan & Ma'riyah, 2022).

Oligarki, yang memiliki kekuatan ekonomi, menggunakan kekayaan mereka untuk memengaruhi politik. Mereka mendukung kandidat yang mereka pilih dalam kontestasi pemilu, bahkan hingga tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada). Oligarki juga memengaruhi politik melalui parpol, yang membuat calon pemimpin, terutama di tingkat daerah, tidak selalu mencerminkan keinginan rakyat, melainkan kepentingan oligarki. Sebagai contoh, pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Medan pada tahun 2020, dimana M. Bobby Afif Nasution, menantu Presiden RI Ir. Joko Widodo, menjadi pemenang. Parpol besar seperti PDI Perjuangan, Gerindra, Partai

Golkar, PAN, Nasdem, Hanura, PSI, dan PPP, mengusung Bobby Nasution, memanfaatkan pengaruh Presiden yang memiliki potensi besar untuk memenangkan pemilihan. Meskipun Bobby Nasution awalnya kurang dikenal di kalangan masyarakat Kota Medan, namanya mulai dikenal sejak menjadi menantu presiden. Hal ini mengakibatkan rekomendasi langsung dari ketua umum (ketum) partai-partai besar untuk Bobby Nasution sebagai Walikota Medan.

Banyak tokoh lokal dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi Walikota Medan periode 2020-2024 sebelum Bobby Nasution muncul. Salah satunya, Ihwan Ritonga, yang memiliki suara terbanyak dalam Pileg DPRD Kota Medan 2019 dan menjabat sebagai ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan. Ihwan Ritonga juga telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi calon Walikota Medan. Selain itu, Akhyar Nasution, yang adalah petahana, dan Salman Alfarisi, yang diusung oleh PKS dan Partai Demokrat, juga memiliki kapasitas untuk menjadi calon Walikota Medan. Namun, Bobby Nasution diusung oleh partai-partai besar, sehingga akhirnya ia dan Aulia Rachman menjadi pemenang Pilkada Kota Medan 2020-2024.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Medan 2020 hanya mencapai 46% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT), sehingga mayoritas rakyat tidak berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa suara rakyat yang tidak ikut memilih jauh lebih banyak daripada suara yang diperoleh Bobby Nasution dan Aulia Rachman. Meskipun partai-partai seperti Gerindra, PDI Perjuangan, dan lainnya mungkin memiliki kandidat yang lebih kompeten, mereka memilih untuk mengusung Bobby Nasution, yang belum teruji sebagai calon Walikota Medan. Oleh karena itu, kontestasi Pilkada Kota Medan 2020 mencerminkan pentingnya oligarki dalam menentukan calon kontestan.

Oligarki memiliki peran yang signifikan dalam pemilihan pemimpin, terutama di tingkat daerah (Rahayu, 2020). Kekuatan ketum parpol dalam menentukan calon pemimpin membuka peluang bagi oligarki untuk lebih memengaruhi politik. Oleh karena itu, perlu dicari solusi untuk membatasi peran oligarki dalam pemilihan kepala daerah di masa mendatang (Ratnasari, 2021). Penelitian dan literatur yang memberikan gambaran yang kuat tentang adanya oligarki dalam berbagai aspek politik di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa oligarki menguasai partai politik dan bahkan memiliki dampak besar dalam pemilihan kepala daerah. Dalam beberapa kasus, oligarki memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk memengaruhi politik dan mengendalikan sumber daya material. Peneliin (Junius, 2017) menggambarkan bagaimana kekuasaan formal DPP Partai Politik di Indonesia memberikan kontrol yang kuat dalam pemilihan kepala daerah, bahkan sampai pada tingkat memberikan sanksi kepada anggota partai. Ini menciptakan kuasa oligarki dalam struktur partai politik. Sedangkan (Koho, 2021) menyebutkan bahwa sistem oligarki di Indonesia memungkinkan kelompok elit untuk menggunakan negara sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka, seringkali mengorbankan kesejahteraan rakyat dan keadilan.

Penelitian oleh (Febriani et al., 2020) menyoroti bagaimana teori oligarki Jeffrey A. Winters dapat menjelaskan hubungan antara pengusaha dan penguasa di sektor penambangan batubara di Kalimantan Timur, menunjukkan bagaimana oligarki dapat memengaruhi sektor industri tertentu. Sedangkan (Sunardi, 2020) menggarisbawahi pentingnya relasi kapital dalam memungkinkan eksistensi dan daya tahan oligarki di Indonesia, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan instrumen politik untuk kepentingan ekonomi mereka. Penelitian oleh (Prajoko et al., 2021) mencatat peningkatan fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang menunjukkan dominasi politik oligarki dalam partai politik dan kegagalan mereka dalam mempersiapkan pemimpin secara berkala. Sedangkan (Zuada et al., 2015) menunjukkan bagaimana oligarki secara langsung dan tidak langsung terlibat dalam berbagai aspek pemilihan kepala daerah, mulai dari mendukung kampanye hingga mengontrol opini publik.

Menurut (Leach, 2015) merujuk pada pandangan Robert Michels tentang partai Sosialis Jerman pada tahun 1911 yang dikuasai oleh kelompok minoritas yang disebut oligarki, menyoroti bagaimana oligarki dapat mengendalikan bahkan partai politik yang berbasis demokratis. Penelitian (Hidayatullah, 2020) menunjukkan bahwa investor politik memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah, dan pada akhirnya, mereka mendapat keuntungan dari pemilu. Dari sekian banyak studi ini, terlihat bahwa oligarki memiliki pengaruh yang substansial dalam berbagai aspek politik di Indonesia, termasuk dalam partai politik, pemilihan kepala daerah, dan pengambilan keputusan politik secara umum.

Penelitian terdahulu menggambarkan berkuasanya oligarki dalam menentukan arah kebijakan politik. Oligarki merupakan kelompok minoritas yang menguasai partai politik untuk mempertahankan kekayaannya. Oligarki memiliki kekuasaan penuh secara politik dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Oligarki tidak terpengaruh dengan ideologi yang dianut suatu negara. Walaupun secara teori demokrasi bertentangan dengan oligarki namun pada kenyataannya justru tumbuh subur di negara yang menganut demokrasi. Bahkan, oligarki menjadi super power pada negara yang menganut sosialis. Oligarki hanya mementingkan eksistensi kekayaan materialnya. Hanya negara yang memiliki kemampuan untuk menghambat eksistensi tersebut. Oleh karena itu, oligarki akan berusaha memiliki kekuasaan secara politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mengancam eksistensinya.

Oligarki menggunakan parpol sebagai wadah untuk menguasai politik. Parpol akan berusaha menempatkan kader atau orangnya pada setiap kesempatan kontestasi politik. Dukungan oligarki terhadap pasangan calon pada kontestasi politik akan memberikan feedback keuntungan pada masa depan. Teori Oligarki Jeffrey A. Winter mampu menjelaskan bagaimana oligarki terlibat dalam penguasaan sumber daya material. Penguasaan oligarki terhadap sumber daya material untuk memastikan kekayaannya meningkat dan posisi sosialnya dipertahankan. Oligarki

terlibat dalam menentukan pimpinan pemerintahan hingga tingkat kepala daerah, sehingga kebijakan pemerintah akan melindungi kepentingannya. Hampir seluruh kegiatan pilkada melibatkan oligarki. Mahalnya biaya politik dimanfaatkan oligarki membiayai calon pemimpin yang diinginkan. Oligarki sebagai pemodal dalam kegiatan pemilu termasuk pilkada yang terlihat seolah demokratis.

Para oligarki terlibat menentukan pemimpin pemerintahan melalui penguasaan terhadap parpol (Rusman & Rafni, 2022). Aktifitas parpol dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Parpol memiliki kekuasaan mengusung calon pemimpin pemerintahan, sehingga salah satu penentu calon pemimpin pemerintahan. Pada umumnya oligarki memiliki kekuasaan politik dengan menjabat sebagai ketua umum dewan pimpinan pusat (DPP) parpol. Para oligarki berkamufase sebagai pengurus parpol sehingga dilindungi secara hukum. Para oligarki memiliki kekuasaan mutlak secara politis demi mempertahankan kekayaan dan pendapatan (Raissoevel, 2022). Para pengurus parpol di daerah tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan politik lokal, karena semua harus izin dari DPP parpol. Para pengurus parpol di daerah terkendala dengan legalitas dan kekuasaan. Akibatnya para pengurus parpol di daerah senantiasa dikendalikan kekuatan oligarki yang berkuasa di DPP parpol. Penelitian terdahulu mampu menjelaskan bagaimana oligarki berperan dalam kekuasaan materi dan politik di Indonesia. Oligarki memiliki keterlibatan dalam pemilihan umum termasuk pilkada dengan menentukan calon kepala daerah yang diinginkan, sehingga kemenangan calon kepala daerah yang diusung dapat menguatkan penguasaan materi dan politik (Purba et al., 2022). Oleh karena itu, teori yang paling ideal menjawab persoalan politik oligarki adalah Teori Oligarki Winter oleh Jeffrey A. Winter.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan memahami peranan oligarki dalam dinamika politik Indonesia, dengan fokus khusus pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan tahun 2020. Tujuan utama adalah mengeksplorasi bagaimana oligarki menggunakan pengaruh ekonomi dan kontrol atas partai politik untuk memengaruhi pemilihan calon kepala daerah, serta dampaknya terhadap integritas demokrasi di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan Teori Oligarki Jeffrey A. Winter sebagai kerangka analisis untuk membedah interaksi antara kekayaan, kekuasaan, dan politik. Melalui studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara oligarki memanipulasi sistem politik untuk kepentingan mereka, serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan kebijakan publik.

## Metode

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami secara holistik dan kontekstual fenomena oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020. Metode ini tidak mengandalkan analisis statistik, melainkan fokus pada pemahaman mendalam mengenai makna dan proses yang terjadi dalam fenomena yang diteliti. Dalam pengumpulan data, peneliti bertindak sebagai instrumen utama, mengumpulkan

informasi langsung dari sumbernya dalam setting alami. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan menggunakan aplikasi Zoom, mengatasi batasan geografis antara peneliti dan informan. Pertanyaan wawancara telah disiapkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan hasilnya didokumentasikan melalui tangkapan layar dan rekaman.

Selain wawancara, studi pustaka juga diintegrasikan sebagai teknik pengumpulan data, dengan menggunakan literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan sumber terkait lainnya untuk memperkuat analisis. Data primer diperoleh dari wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen relevan. Teknik display data, seperti narasi teks, grafik, matriks, bagan, atau jaringan, akan digunakan untuk menyajikan dan mengorganisir data secara sistematis, memudahkan pemahaman, dan membantu dalam pembuatan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pilkada Kota Medan tahun 2020 merupakan sebuah peristiwa politik yang signifikan, di mana calon Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2021-2024 dipilih. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Medan pada tanggal 23 September 2020 menetapkan dua pasangan calon setelah seleksi dokumen, yaitu pasangan M. Bobby Nasution - Aulia Rachman dan pasangan Akhyar Nasution - Salman Al Farisi. Partai politik memiliki peran penting dalam mengusulkan calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan undang-undang (UU). Dalam Pilkada Kota Medan 2020, kedua pasangan calon diusulkan oleh gabungan partai politik atau partai politik pendukung, dengan pasangan Bobby-Aulia didukung oleh PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, Hanura, PSI, dan PPP, sementara pasangan Akhyar-Salman diusulkan oleh PKS dan Demokrat. Para elit politik dari tingkat nasional juga terlibat dalam kampanye sebagai tim sukses (timses) masing-masing pasangan. Kampanye Pilkada dilaksanakan dari tanggal 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 dengan peran langsung dari timses. KPU Kota Medan menetapkan pasangan Akhyar-Salman sebagai nomor urut 1 dan pasangan Bobby-Aulia sebagai nomor urut 2. Pencoblosan surat suara berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.

Hasil rekapitulasi suara menunjukkan partisipasi pemilih sebesar 45,8%, dengan pasangan Bobby-Aulia memperoleh suara lebih banyak daripada pasangan Akhyar-Salman. Pemenangnya, Bobby Nasution dan Aulia Rachman, secara resmi diumumkan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 18 Februari 2021. Meskipun pasangan Akhyar-Salman sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan tersebut akhirnya ditolak, dan pasangan Bobby-Aulia resmi menjadi Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2021-2024. Sebagai bagian dari konteks Pilkada Kota Medan 2020, ada juga perdebatan tentang keterlibatan oligarki dalam proses politik. Oligarki di sini mengacu pada pengaruh kelompok elit ekonomi dan politik yang mengendalikan partai politik. Mereka memanfaatkan partai politik

untuk memajukan kepentingan mereka, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah.

Oligarki ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam partai politik, dan mereka berfokus pada menguasai partai politik sebagai wadah untuk mempertahankan dan memajukan kekayaan mereka (Rasaili, 2016). Hal ini dapat terlihat dari bagaimana para elit ekonomi seperti Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Luhut Binsar Panjaitan, Surya Paloh, dan lainnya memiliki pengaruh dalam partai-partai tertentu dan memainkan peran dalam menentukan calon kepala daerah. Pada Pilkada Kota Medan 2020, peran oligarki dalam menguasai partai politik sangat tampak, terutama dalam partai yang mendukung Bobby Nasution. Ini juga menunjukkan bahwa keputusan partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tidak selalu didasarkan pada kapabilitas kepemimpinan, tetapi juga pada hubungan politik dan kepentingan ekonomi yang mungkin menguntungkan kelompok oligarki di masa depan. Selain itu, oligarki juga terlibat dalam berbagai aspek kampanye, termasuk pembiayaan, kampanye massa, dan pengaruh dalam mengeluarkan rekomendasi partai. Ini menciptakan ketergantungan yang besar pada partai politik terhadap kelompok oligarki, yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Secara keseluruhan, Pilkada Kota Medan 2020 adalah contoh nyata tentang bagaimana oligarki memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia, terutama melalui kendali mereka atas partai politik. Hal ini menggambarkan tantangan dalam menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan bebas dari pengaruh kelompok elit ekonomi dan politik (Elyta et al., 2022). Sistem demokrasi berprinsip kedaulatan tertinggi negara ada di tangan rakyat, sedangkan pada politik oligarki negara hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompoknya. Oleh karena itu secara etika sistem demokrasi bertentangan dengan praktik politik oligarki. Namun secara hukum belum ada aturan yang membatasi kegiatan politik oligarki itu sendiri. Keterlibatan oligarki mempengaruhi kebijakan politik khususnya melalui kontestasi pemilu bukan hal yang salah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, walaupun dampaknya berakibat buruk dalam kehidupan sosial masyarakat (Nika, 2021). Oligarki mempengaruhi kebijakan politik melalui lembaga yang sah dan dilindungi oleh negara yaitu parpol. Parpol yang dikuasai oleh oligarki memiliki hak dan kekuasaan dalam menentukan calon pemimpin pemerintahan pada saat kontestasi politik (Gunanto, 2020).

Partai politik memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif. Anggota legislatif (DPR) ditentukan oleh parpol, sedangkan eksekutif merupakan jabatan politis yang diusulkan oleh partai politik. Jadi, legislatif dan eksekutif memiliki kepentingan yang tinggi terhadap partai politik di Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan partai politik merupakan sekelompok warga negara yang mempunyai kepentingan bersama untuk membela kepentingan kehidupan warga negara. Namun

kenyataannya partai politik lebih mengutamakan kepentingan golongan (partai) daripada masyarakat pada umumnya. Pragmatisme perekrutan calon anggota parlemen, serta adanya perilaku korupsi legislasi menunjukkan parpol lebih mengutamakan kepentingan partai daripada masyarakat.

Penguasaan parpol terhadap legislatif dan eksekutif dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi parpol untuk berkuasa terutama dalam menentukan calon kepala daerah (Arianto, 2021). Hal tersebut dimanfaatkan oleh parpol meningkatkan tawaran politik demi mencapai tujuan atau kepentingannya (Raissoevel, 2022). Jadi, tidak heran elit politik parpol berani terlibat langsung dalam kontestasi Pilkada Kota Medan tahun 2020. Elit parpol secara terang-terangan menggunakan kekuatan politiknya dengan mengatasnamakan parpol menetapkan langsung calon Walikota Medan. Elit parpol terkesan otoriter dan tidak demokratis dalam menentukan kebijakan hingga mengorbankan kader yang dicap pembangkang. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterlibatan oligarki dalam menentukan kebijakan. Adanya dominasi dukungan parpol-parpol besar pada pasangan Bobby-Aulia menunjukkan adanya kepentingan politik yang sangat besar pada Pilkada Kota Medan tahun 2020. Elit-elit parpol yang memiliki kekuasaan pada parpol merupakan bagian dari politik oligarki. Keterlibatan elit-elit politik nasional secara langsung pada struktur tim sukses pemenangan menunjukkan oligarki terlibat pada pilkada tersebut melalui partai politik.

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa Oligarki terlibat dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Hal tersebut dinilai dari adanya pengutamaan kepentingan elit dan dominasi parpol yang sangat tinggi dalam menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan. Fenomena parpol besar mendukung Bobby Nasution yang diuraikan sebelumnya disertai keterlibatan elit parpol dalam tim pemenangannya merupakan hal yang tidak biasa pada kontestasi setingkat pemilihan walikota dan wakil walikota. Partai Gerindra telah menjadi oposisi pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014. Namun, Partai Gerindra beralih menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi dengan memberikan perhatian yang sangat besar mendukung dan mengusulkan Bobby Nasution sebagai calon Walikota Medan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2022. Partai Gerindra menurunkan langsung Sandiaga Uno sebagai Ketua Pembina Tim Sukses Pemenangan.

Oligarki memiliki kepentingan di dalam setiap kontestasi politik, termasuk Pilkada Kota Medan tahun 2020. Oligarki akan mendukung kandidat yang dianggap memberikan keuntungan ke depannya. Praktik politik oligarki dilakukan dengan berbagai cara dan hal tersebut dianggap sah saja, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat dibatasi dengan hukum yang baik. Informan dari Gerindra jelas merasa adanya keterlibatan oligarki dalam pilkada Kota Medan Tahun 2020. Begitu juga dengan parpol pendukung lainnya khususnya PDIP dengan tegas mengalihkan dukungannya kepada Bobby Nasution daripada kader seniornya



sendiri Akhyar Nasution yang juga incumbent pada saat itu. Keterlibatan langsung elit menguatkan kesimpulan adanya keterlibatan oligarki pada pilkada Kota Medan tersebut.

Berdasarkan teori oligarki yang dinyatakan Hadiz dan Robinson, maka PDIP tidak dikuasai oligarki. Megawati Sukarno Putri sebagai ketua umum hanya berkuasa secara politik pada PDIP bukan penguasa faktor-faktor ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan partai yang menjadikan keputusan ketum sebagai keputusan partai untuk menghindari adanya intervensi dari kelompok oligarki. Oligarki memiliki kepentingan politik pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Karena, Bobby Nasution memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Jokowi, sehingga sangat menarik untuk mencapai kepentingan politik tersebut. PDIP memiliki kesamaan dukungan dengan oligarki, namun memiliki perbedaan dalam hal kepentingan dan tujuan. Oligarki memiliki keterlibatan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020, dengan cara dukungan melalui parpol. Dukungan parpol berpengaruh signifikan terhadap kemenangan kontestan dalam pilkada tersebut. Oleh karena itu, antara parpol dan kontestan saling membutuhkan dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020.

Oligarki memiliki keterlibatan pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020, dengan cara dukungan melalui parpol. Oligarki mendukung calon kepala daerah melalui parpol, oligarki ada pada setia parpol. Hal tersebut menguatkan kesimpulan praktik keterlibatan oligarki pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 dengan cara mengusung calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Medan melalui ketergantungan pada parpol yang dikuasai. Berdasarkan informasi dari informan PDIP dan PKS, ada keterlibatan oligarki dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020. Oligarki memiliki kepentingan politik yang sangat besar pada pilkada tersebut karena melibatkan keluarga presiden (Jokowi). Oligarki terlibat melalui kekuasaan parpol menentukan calon Walikota Medan. Fenomena Ikhwan Ritonga diabaikan sebagai kader potensial Partai Gerindra dan pemecatan Akhyar Nasution sebagai anggota yang merupakan incumbent dan kader senior PDIP menunjukkan adanya pengutamaan kepentingan elit parpol dalam menentukan kebijakan dan kebutuhan mendesak akan kepemimpinan, walaupun berdampak pada konflik internal.

Berdasarkan hasil uraian penelitian terdahulu menyatakan Oligarki memiliki kekuasaan politik terlibat dalam kegiatan pemilihan umum termasuk tingkat pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan cara mengusung calon kepala daerah yang dianggap memberikan keuntungan politik dan pencapaian tujuan kelompoknya. Berdasarkan teori oligarki yang dikemukakan menyatakan oligarki memiliki kekuasaan politik melalui partai politik. Berdasarkan keterangan informan bahwa oligarki terlibat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 melalui partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa Oligarki terlibat pada Pilkada Kota Medan Tahun 2020 yaitu melalui kekuasaan pada partai politik yang dilindungi oleh undang-undang dan Peraturan Pilkada sehingga memiliki kekuasaan menentukan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan pada saat Pilkada Kota Medan tahun 2020.

Secara umum Pilkada Kota Medan Tahun 2020 berlangsung dengan lancar dan baik. Dari sudut pandang politik, pilkada tersebut melibatkan oligarki, namun dari Bawaslu sendiri menilai penyelenggaraan pilkada hanya dari sudut pandang hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada. Praktik oligarki terjadi karena adanya dukungan dari lingkungan penguasa dan parpol besar. Parpol memiliki aturan dalam proses pengusulan calon kontestan Pilkada. Namun, Bawaslu tidak berwenang mengurus proses pencalonan yang dilakukan oleh parpol tersebut. Bawaslu tidak bisa mengubah kebijakan karena Bawaslu bekerja sesuai perundang-undangan yang ditetapkan DPR. Apabila ada peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak mendukung nilai-nilai demokrasi maka perlu dilakukan revisi. Oleh karena itu, kelompok masyarakat seperti akademisi menjadi pihak yang paling diharapkan mampu memperjuangkan peraturan perundang-undangan yang terlindungi dari kepentingan politik oligarki.

Berdasarkan keterangan Bawaslu tersebut menunjukkan tidak adanya kuasa penyelenggara pemilu membatasi keterlibatan oligarki dalam kontestasi pemilu. Penyelenggara pemilu menyadari adanya keterlibatan oligarki, namun penyelenggara pemilu hanya bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu yang tidak mampu membatasi keterlibatan oligarki dalam kontestasi tersebut. Oligarki berkuasa pada parpol, sedangkan parpol menempatkan kadernya di legislatif dan eksekutif baik pusat maupun daerah. Adapun legislatif dan eksekutif mengeluarkan UU dan peraturan tentang pilkada yang memberi kewenangan kepada pimpinan parpol untuk mengusung pasangan calon pada pilkada. Secara tidak langsung hal ini memberikan kekuasaan kepada oligarki untuk berbuat sesuai dengan kepentingannya, oleh karena itu, kelompok masyarakat seperti akademisi menjadi pihak yang paling diharapkan memperjuangkan adanya uji materi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu yang justru dianggap melindungi kepentingan politik oligarki. Pada Pilkada Kota Medan tahun 2020 menunjukkan oligarki lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan rakyat. Hal tersebut sangat buruk bagi masyarakat khususnya Kota Medan. Kelompok masyarakat seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan lain-lain tentu memiliki kemampuan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui peraturan perundang-undangan yang membatasi kekuasaan oligarki baik secara ekonomi maupun politis.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil menegaskan bahwa oligarki memiliki peran signifikan dalam Pilkada Kota Medan Tahun 2020, terutama melalui penguasaan mereka atas partai politik yang diakui oleh undang-undang dan peraturan Pilkada. Hasil ini mencerminkan bagaimana oligarki mampu mempengaruhi secara substansial penentuan calon Walikota dan Wakil Walikota di Medan, menandakan kontrol mereka atas proses politik. Meskipun telah mencapai tujuan penelitiannya, studi ini

memiliki batasan yang menjadi titik awal untuk penelitian lanjutan. Salah satu batasan adalah fokus pada kasus spesifik Pilkada Medan, yang membatasi generalisasi temuan ke konteks politik lain di Indonesia. Oleh karena itu, saran utama yang muncul adalah perlunya penelitian lanjutan yang lebih luas untuk mengeksplorasi dampak oligarki dalam politik Indonesia secara lebih mendalam dan komprehensif. Hal ini akan membantu dalam memahami berbagai dimensi oligarki dalam politik nasional dan lokal, serta konsekuensinya terhadap demokrasi.

## Referensi

- Arianto, B. (2021). Menakar Politik Keckerabatan dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 7(1), 81–98.
- Elyta, E., Hertanto, H., & Maryanah, T. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi. *Perspektif*, 11(4), 1394–1406.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan kritis politik dinasti di Indonesia. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191.
- Hasibuan, S., & Ma'riyah, C. (2022). The The Institution Political Education of PDI Perjuangan In The School Party for The Candidates of Local Executives 2020: Institusi Pendidikan Politik PDI Perjuangan bagi Calon Kepala Daerah 2020. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 825–851.
- Kodiyat, B. A., & Andryan, A. (2021). Pengaruh Partai Politik Bagi Pendidikan Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 101–112.
- Nika, I. (2021). Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020). *Lex Renaissance*, 6(3), 562–577.
- Permatasari, Y. (2022). Insecurisme Politik Rakyat Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Populika*, 10(1), 10–23.
- Purba, G. T. H., Subhilhar, S., & Ridho, H. (2022). Analisis Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2020. *Perspektif*, 11(1), 298–317.
- Rahayu, A. S. (2020). Menyoal Politik Dinasti dan Dinamiknya. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Raissoevel, N. F. (2022). 'pengaruh Politik Dinasti Terhadap Pemenuhan Hak Politik Warga Negara (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kota Surakarta Tahun 2020).
- Rasaili, W. (2016). Budaya Politik dan Kualitas demokrasi dalam Pilkada 2015-2020 (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pertama di Indonesia). *ARISTO*, 4(2), 1–13.
- Ratnasari, E. (2021). Analisis Sentimen Kepala Daerah Terpilih Jelang dan Pasca Pelantikan Resmi Sebagai Pemimpin Daerah Terpilih pada Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah 2020. *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 96–117.

- Rusman, A., & Rafni, A. (2022). Modal Sosial Jokowi Dengan Politik Kekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 Di Surakarta Dan Medan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 106–113.
- Suryadi, R. (2022). Analisis Kritis Implementasi Sila Keempat Pancasila dalam Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 146–158.
- Syaputra, M. Y. A., & Sihombing, E. N. (2020). Relasi Aspek Sosial Dan Budaya Dengan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(2), 205–220.